

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Akademi Kepolisian (AKPOL) sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulasi Surat Ijin Mengemudi (SIM). Dalam proses penyidikannya, terjadi “perebutan” diantara KPK dan POLRI. Masing-masing lembaga penegak hukum tersebut tetap berkeinginan menyidik kasus ini, dengan alasan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pro dan Kontra muncul di berbagai media dari beragam kalangan.

Berita, informasi yang dibungkus oleh pengalaman dan pernyataan dari berbagai sumber yang dirangkum dalam suatu tulisan. Berita bukanlah informasi yang sebenarnya. Konstruksi berita terjadi dalam pembuatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pembingkai (*framing*) pemberitaan dugaan kasus korupsi alat simulasi di korps lalu lintas di harian Kompas dan Jawa Pos pada bulan Agustus 2012. Analisis yang digunakan adalah Analisis *Framing*. Konsep ini dirintis oleh Zhondang Pan dan Gerald Kosicki. Analisis ditinjau dari empat unsure, yaitu (1) Sintaksis, (2) Skrip, (3) Tematik, dan (4) Retoris. Analisis dilakukan juga dengan membedakan berita sesuai dengan tema yang diungkapkan oleh masing-masing harian.

Hasil penelitian ini adalah pembagian tiga tema, yaitu (1) lembaga penegak hukum yang lebih berhak menyidik, (2) proses penyidikan, dan (3) Rekomendasi penyelesaian. Dengan mengelompokkan pada tiga tema tersebut terlihatlah konstruksi pada harian Kompas dan Jawa Pos. Kompas memberikan dukungan kuat terhadap langkah yang diambil KPK berdasarkan Undang Undang Kewenangan KPK. Selain itu, ditonjolkan juga kinerja KPK yang professional dipaparkan oleh Kompas. Kompas berpendapat bahwa seharusnya kasus ini diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Sedangkan Jawa Pos lebih banyak menentang peran Polri dari KPK dalam menyelesaikan masalah ini. Selain itu, juga lebih banyak memaparkan mengenai keseriusan Polri dalam melakukan proses penyidikan. Bahkan, Jawa Pos menganggap apa yang dilakukan Polri telah termaafkan karena hal ini terjadi karena belum adanya reformasi besar-besaran di tubuh Polri. Jawa Pos lebih berpihak kepada Polri sekalipun tetap mengakui dan menghargai peranan KPK dalam penanganan kasus korupsi.

Kedua harian tersebut sepakat bahwa presidenlah yang menjadi subyek yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

Kata kunci : *Framing*, Korupsi, Kasus Alat Simulasi SIM

ABSTRACT

Anti Corruption Commission (KPK)have set The Police Academy Governor as the suspect in the corruption case of driving license simulation foundation. In the investigation processes, the “struggle” happened between the KPK and the Police. Each of the legal institution insisted on this Investigation, and they reason is same prevent the corruption in Indonesia. Pro and contrary has arose in all the media from every layer of society.

News, information which is wrapped by experiences and statements from all sources and summarized in script(s). News isn't the real information. Construction of news is often to be happened in the making of it. The aim of this study is to find out the news framing of corruption case of this license simulasi at this traffic corps, in Kompas and Jawa POS Newspaper month august 2012. The analysis involved is Framing analysis. This concept was pioneered by Zhondang Pan and Gerald Kosicki. This analysis is reviewed from 4 aspect, which are (1) Syntax, (2) Script, (3) Thematics, (4) Rhetoric. Analysis is executed also by differentiate the news based on the proper theme which is uttered by each newspaper.

The results of this study are to classify three themes which are (1) Legal institution who have more rights for investigating, (2) Investtigation processes, and (3) Finishing Recommendation. By these classification themes the construction of the news in Kompas and Jawa Pos newspaper. Kompas exposing the KPK as the legal institution who has more rightful of investigating, because as mentioned in the legislation number 30, 2002, Kompas also presume the Police have hindered the investigation that've been executed. On the other hand Jawa Pos did'nt exposing the KPK nor POLRI. Jawa Pos presume that with this case is reflecting the performance of KPK that always increasing and POLRI performance which is must be reformed. Next, both KPK or POLRI, agree that president could decide who have reserved the right more to investigate this case. Yet the corruption termination in Indonesia could be handled wholly.

Keywords : *Framing, Corruption, Driving License Simulation Case.*